

---

**ANALISIS EKONOMI POLITIK DI ARAS LOKAL (STUDI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA IMBANAGARA RAYA)****Oleh****Asep Nurwanda<sup>1</sup>, Elis Badriah<sup>2</sup>, Anis Lisara<sup>3</sup>****<sup>1,2,3</sup>Universitas Galuh Ciamis****Email: [asepnurwanda12@gmail.com](mailto:asepnurwanda12@gmail.com)**

---

**Article History:***Received: 02-10-2021**Revised: 17-10-2021**Accepted: 05-11-2021***Keywords:***Political Economy, Village-Owned Enterprises (BUMDes)*

**Abstract:** *The study is titled, Political Economy at The Local With Studies about management village-owned business entity (BUMDES) in order to improve the welfare of the Imbanagara Raya village community, Ciamis Regency. The purpose of this study was to find out how the management of the Imbanagara Raya Village Owned business entity in improving community welfare. The theory used by researchers is political economy. Neoclassical politic economy specifically state centred approach. The research method used a qualitative research method with the technique of determining informants, namely by purposive sampling with data collection through interviews, observation and documentation, then the data obtained is reduced to be selected according to the needs for further collection and then concluded to be presented. The results of the study show that the management of the Imbanagara Raya Village-Owned Enterprises (BUMDes) has not gone well. This can be seen from the types of businesses that have been built have not progressed. Although Imbanagara Raya Village-Owned Enterprises (BUMDes) have not had a positive impact on the entire Imbanagara Raya Village society in improving the village economy and the welfare of the Imbanagara Raya Village society. But with the existence of BUMDes at least it can benefit by being able to provide input to the APBDes.*

---

**PENDAHULUAN**

Pada masa reformasi ini desa berhak mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri berkat adanya otonomi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan (Widjaja, 2014 : 76) . Berawal dari terciptanya otonomi daerah pada masa setelah reformasi, untuk menunjang sistem demokrasi yang ditetapkan di Indonesia. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang – undangan. (Widjaja, 2014 : 76). Tindak lanjut dari otonomi daerah yaitu terbentuknya otonomi desa. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah (Widjaja, 2013 : 165).

Lokal atau representasi dari lokal disini ialah daerah atau desa. Dimana desa merupakan ukuran dari keberhasilan perekonomian suatu negara, dimana jika desa berhasil membangun perekonomiannya memperlihatkan bagaimana negara berhasil membangun daerahnya, karena daerah merupakan penopang negara.

Dengan adanya otonomi daerah, desa imbanagara raya bisa melaksanakan pembangunan ekonomi, dengan tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat. Salah satunya usaha yang dilakukan yaitu dengan membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Imbanagara Raya yang tujuan utamanya untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Latar belakang pendirian bumdes di Imbanagara Raya yaitu berawal dari adanya peraturan yang tertera pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab X tentang Badan Usaha Milik Desa yang dilanjutkan dengan Permen PDPTT No 04 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembuat n Badan Usahan Milik Desa, kemudian ditindak lanjuti oleh desa Imbanagara Raya dengan mendirikan BUMDes Imbanagara Raya pada tahun 2015 dengan perdes No 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya ini berdiri sejak tanggal 17 Oktober 2015, BUMDes dibentuk melalui hasil musyawarah desa. Dengan kegiatan usaha didalamnya yaitu Pengelolaan Air bersih, Pabrik Kerupuk, Kios. Modal Penyertaan yang berasal dari dana desa untuk tahun 2015 yaitu Rp. 36. 750.000, Tahun 2016 Rp. 130.000.000, Tahun 2017 Rp.170.000.000. Untuk Pembagian Hasil dari Usaha BUMdes Imbanagara Raya yaitu untuk Disetor ke APBDes sebesar 30%, Untuk Pengembangan Modal usaha BUMDes 40%, Untuk Dewan Komisaris, Pelaksana Operasional 25%, Untuk Badan pengawas 2,5%, Untuk Pengembangan dan Dana pendidikan sebesar 2,5 %. Dengan keuntungan rata – rata perbulan

**Tabel 1. Pendapatan Rata – Rata Per - unit Usaha**

No	Jenis Usaha	Pendapatan Perbulan	Pendapatan Pertahun
1	Pengelolaan Air bersih	Rp. 600.000,-	Rp. 7.200.000,-
2	Pabrik Kerupuk	Rp. 2.000.000,-	Rp.24.000.000,-
3	Kios dan penjualan gas	Rp. 450.750,-	Rp. 5.409.000,-
Jumlah		Rp.3,050,750	Rp.36,609,000

(Sumber dari hasil wawancara dengan Ibu Ade selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya)

Penelitian ini hendak menjelaskan tentang apakah dengan dibangunnya BUMDes dan unit – unit usaha yang ada untuk menggali potensi di desa, bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunanan perekonomian serta mensejahterakan masyarakat.

## LANDASAN TEORI

Ekonomi Politik merupakan suatu ilmu yang mengkaji bagaimana persoalan ekonomi yang terjadi di suatu negara di selesaikan dengan menempatkan kekuatan politik sebagai kekuatan pendukung (*driven force*) dalam memberikan solusi terhadap kasus – kasus ekonomi. (Hubungan antara Ekonomi dan Politik bisa bermakna eksplanatori (menjelaskan bagaimana keduanya terkait) dan bisa juga bersifat normatif (bagaimana seharusnya sifat perkaitan di antara kedua disiplin ilmu tersebut) (Fahmi, 2013;8).

Teori yang digunakan yaitu ekonomi politik neoklasik khususnya dalam model pendekatan terpusat ke negara ekonomi tidak beroperasi secara bebas dalam ruang hampa, tetapi ada keseimbangan antara pasar dan negara, dimana negara ikut menentukan bagaimana ekonomi beroperasi. Artinya dalam perspektif ekonomi politik neoklasik khususnya dalam model terpusat ke negara kita melihat negara berperan lebih aktif (Deliarnov, 2006:66).

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilaksanakan yaitu Metode Penelitian Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dapat menjelaskan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi seseorang atau kelompok orang terhadap sesuatu (Hamdi, 2012;9). Penelitian Kualitatif dilakukan dengan mrngumpulkan kata – kata atau kalimat dari individu, buku dan sumber lain (Martono, 2015;12). Dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kasus.

Teknik Pengambilan Sample yaitu dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan – pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya (Idrus, 2009: 96). Dengan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

Metode Analisis data yang digunakan yaitu Analisis Data Interaktif. Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam buku Idrus (2009) Model Interaktif terdiri dari 3 hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta validitas data menggunakan Triangulasi Sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa Imbanagara Raya ini berdiri sejak tanggal 17 Oktober 2015 dan dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa yang dihadiri tokoh – tokoh masyarakat. Dengan jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes Imbanagara Raya ada 3 usaha yang sedang berjalan yaitu Pabrik kerupuk, Kios dan penjualan gas, Pengelolaan air bersih dan perkreditatan yang akan berjalan. Kepemilikan BUMDes Imbanagara Raya ini merupakan dimiliki oleh desa yang dikelola secara bersama.

Usaha yang pertama yaitu Pengelolaan air bersih yang mulai beroperasi tahun 2014, serta pengelolaan diambil oleh BUMDes sejak tahun 2015. Dengan modal penyertaan tahun

2015 sebesar Rp.30.000.000 dan tambahan Rp. 20.000.000 dengan omset perbulan Rp.600.000 perbulan. Usaha selanjutnya yaitu Pabrik Kerupuk yang beroperasi sejak agustus 2015 dengan modal awal sebesar Rp.100.000.000 kemudian ditambah sebesar Rp.30.000.000 dengan omset perbulan yaitu Rp2.000.000. usaha yang ketiga yaitu kios dan penjualan gas dengan modal awal Rp.150.000.000 dengan omset perbulan Rp 450.750. Dari semua omset yang masuk keuntungan bersih yang didapat BUMDes Imbnagara Raya sebesar Rp. 17.933.581.

Pembagian hasil usaha BUMDes untuk tahun 2017 yang pertama disetor ke APBDes sebesar 30%, Pengembangan modal usaha BUMDEs sebesar 40%, Dewan Komisaris, Pelaksana Operasional 25%, Badan Pengawas 2,5%, Pengembangan dan dana pendidikan 2,5%. Jika dihitung Disetor ke APBDes sebesar Rp. 5.380.074,3, Pengembangan modal usaha sebesar Rp. 7.173.432,4, Dewan Komisaris Pelaksana Operasional Sebesar Rp. 4.483.395,25, Badan Pengawas sebesar Rp. 448.339,525 dan pengembangan usaha Rp. 448.339,525. Total Keuntungan bersih tahun 2017 yaitu Rp. 17.933.581.

Jika dianalisis menggunakan teori ekonomi politik neoklasik khususnya model pendekatan terpusat ke negara dengan model analisis birokrat pemburu rent (*Rent Seeking Bureaucrates*). Jika negara punya tujuan – tujuan sendiri, dan jika dalam upaya mengejar tujuan – tujuan tersebut membawa implikasi terhadap peristiwa – peristiwa ekonomi dan institusi – institusi ekonomi maka negara bisa berusaha mengontrol ekonomi bukan mengoreksi kegagalan pasar tetapi demi mencapai tujuannya sendiri. Seperti dalam model analisis birokrat pemburu rent (*Rent Seeking Bureaucrates*) campur tangan pemerintah tidak selamanya didorong untuk melayani kepentingan publik, tetapi disana – sini diarahkan untuk kepentingan individu, perusahaan dan golongan tertentu (Deliarnov 2006:66 – 68).

Paham ini cocok dengan apa yang terjadi dimana BUMDes yang dibentuk dengan hasil campur tangan pemerintah. Pemerintah membangun BUMDes dengan memiliki tujuannya sendiri. Termasuk desa Imbangara raya yang membangun BUMDes dengan hasil musyawarah. Tidak selamanya untuk melayani kepentingan publik bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan individu atau kepentingan golongan. Seperti membuka jenis usaha yang memberikan keuntungan bagi mereka atau bagi segelintir orang/ sebagian masyarakat dan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Contoh usaha yaitu Pabrik Kerupuk milik BUMDes Imbanagara Raya, yang pada kenyataannya tidak memiliki dampak sosial ekonomi atau kurang memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat, namun hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja, seperti pemilik sebelumnya yang menjual pabrik tersebut, kemudian digunakan kembali atas nama BUMDes. Masyarakat kecil hanya menikmati sedikit seperti menjadi karyawan pabrik kerupuk tersebut yang jumlahnya tidak terlalu banyak.

Usaha Pabrik Kerupuk dalam filosofi pendirian BUMDes salah satunya menyebutkan sebaiknya usaha yang dibangun bumdes tidak mengambil alih ekonomi warga dan itu disebutkan dalam artikel milik kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang mengatakan agar usaha bumdes tidak bersinggungan dengan usaha masyarakat lainnya. Sementara yang terjadi di BUMDes Imabanagara Raya justru sebaliknya. BUMDes membangun usaha Pabrik Kerupuk yang pada kenyataannya, usaha pabrik kerupuk di Desa Imbanagara Raya tidak hanya milik BUMDes saja, tapi ada juga milik masyarakat lainnya.

Menurut salah satu tokoh masyarakat jenis – jenis usaha yang dibangun BUM Desa tidak sesuai dengan tujuan didirikannya BUM Desa. usaha usaha yang dibangun BUM Desa tidak memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. dampak dari adanya BUM Desa hanya bisa dinikmati segelintir orang, dan tidak mencakup keseluruhan masyarakat. menurut salah satu RT bahwa masyarakatnya cenderung tidak tahu apa itu BUMDes, apa keuntungan adanya BUM Desa, dan kurang antusias dengan adanya BUM Desa.

Menurut sekdes imbanagara raya, kurangnya kesinambungan antara pengelola BUM Desa dan masyarakat dalam sosialisasi kepada masyarakat hal itu disetujui oleh salah satu RT menurutnya ini akibat dari kurangnya sosialisasi dari pemerintahan desa dan pengurus BUM Desa itu sendiri. Serta jenis usaha yang dibangun tidak bisa menyentuh seluruh masyarakat terutama masyarakat masyarakat kecil atau masyarakat dengan profesi seperti petani. Jadi itu mengakibatkan masyarakat cenderung apatis dan tidak antusias dalam menanggapi adanya BUM Desa.

Kesuksesan BUMDes bergantung pada jenis atau model usaha yang dibangun, dikelola oleh BUMDes. Selain untuk mengelola aset desa yang sudah ada juga untuk memberi inovasi jenis – jenis usaha agar masyarakat terutama yang berprofesi sebagai petani tertarik untuk ikut serta berpartisipasi ikut mengelola dan menjalankan usaha bersama BUMDes. BUMDes masih dihadapi persoalan pengembangan lembaga bumdes itu sendiri beberapa diantaranya rendahnya produktivitas (teknologi rendah), keterbatasan modal, rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan masyarakat.

Jika disimpulkan, adanya BUMDes Imbanagara Raya belum berhasil memberdayakan masyarakat dalam perencanaan pemabangunan perekonomian untuk meningkatkan perekonomian desa. Apalagi dengan mensejahterakan masyarakat. BUMDes baru mampu mendapatkan dan meningkatkan profit atau keuntungan untuk meningkatkan usaha – usaha yang dimilikinya. Manfaat kehadiran BUMDes hanya dirasakan segelintir orang saja.

## KESIMPULAN

Dalam pelaksanaanya BUMDes Imbanagara Raya masih memiliki kekurangan. Manfaat dari kehadiran BUMDes belum dirasakan seluruh masyarakat dan Sebagian masyarakat menganggap usaha yang didirikan BUMDes belum sesuai dengan tujuan didirikannya. kurangnya sosialisasi yang dilakukan BUMDes serta Pemerintah Desa membuat banyak masyarakat tidak tahu dan tidak terlalu antusias dengan adanya BUMDes. BUMDes Imbanagara Raya belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa imbanagara raya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Caporaso, James A. Levine, David P. 2015. *Teori – Teori Ekonomi Politik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- [2] Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Erlangga. Jakarta
- [3] Fahmi, Irham. 2013. *Ekonomi Politik Teori dan realita*. Alfabeta. Bandung.
- [4] Halim, Abd. 2014. *Politik Lokal Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube , Modal dan Panggung*. LP2DB. Yogyakarta.
- [5] Hamdi, Asep, Saepul. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- [6] Idrus, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan*

*Kuantitatif*. Erlangga. Jakarta.

- [7] J Erika, 2014. *Mengenal Desa Sebagai Potensi Pendapatan Daerah*. CV. Aryhaeko Sinergi Persada. Surakarta
- [8] Kurnia, Rohmat. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Desa*. Bee Media Pustaka. Jakarta.
- [9] Kurnia, Rohmat. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tata Kelola Administrasi dan Keuangan Pemerintah Desa*. Bee Media Pustaka. Jakarta.
- [10] Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial Konsep –Konsep Kunci*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [11] Moleong, Lexy, J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- [12] Mufti, Muslim. 2012. *Teori – Teori Politik*. Pustaka Setia. Bandung.
- [13] Widjaja, HAW. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [14] Widjaja, HAW. 2013. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada. Jakarta